

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk lembaga pemerintahan maupun masyarakat adalah dapat mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih baik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology atau ICT) di dunia telah semakin luas.

ICT dipergunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. Kelebihan dari ICT ini adalah dalam hal kecepatan, kemudahan, dan biaya yang lebih murah, sehingga mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat.

Perkembangan internet sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat Indonesia, hampir semua instansi pemerintahan mulai menggunakan sistem online untuk melakukan input atau output data. Hal tersebut menjadi sebuah gambaran betapa berkembang pesatnya suatu jaringan internet di instansi-instansi pemerintahan saat ini. Perkembangan teknologi khususnya internet membawa masyarakat kedalam dunia yang serba canggih, serba cepat dalam melakukan aktivitas apapun.

Penulis mencoba menggali seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap teknologi dalam bidang apapun, untuk sekarang dan beberapa tahun kedepan gaya hidup masyarakat tidak akan terlepas dari internet karena kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan, dan pendayagunaan ICT dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. ICT dan pengetahuan dapat diciptakan secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik.

Kebijakan untuk mengembangkan ICT dilakukan oleh pemerintah daerah secara baik, karena menginginkan pelayanan yang baik untuk meraih kesempatan - kesempatan yang ada. ICT sudah menjadi bagian yang sangat signifikan dalam perkembangan teknologi saat ini, perkembangan teknologi informasi dipengaruhi

oleh tingginya kebutuhan akan teknologi dan sistem informasi yang akurat, efektif dan efisien.

ICT dibuat agar mempermudah dalam pengelolaan data maupun informasi serta memudahkan kita dalam mencari data maupun informasi tersebut, kemajuan teknologi informasi yang pesat ini seharusnya menjadi potensi dalam pemanfaatannya secara luas. Membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat dalam hal ini ICT harus bisa menjadi manfaat besar bagi penggunanya. Seiring dengan perkembangan ICT, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang diteliti sedang melakukan pelaksanaan sistem baru pada proses pembuatan KTP yang telah dilakukan secara online. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah daerah di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan. Selain melayani pembuatan KTP Online yang bersifat Intern, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang diteliti mempunyai produk layanan seperti ganti nama, akta kelahiran, akta kematian, akta pangakuan dan pengesahan anak, akta pengangkatan anak, akta penceraian, akta perkawinan, jenis layanan kependudukan, dan salinan akta.

Awalnya pada akhir Bulan Januari Tahun 2009 pelaksanaan pembuatan KTP secara Online oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Juli Tahun 2009 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Madiun, kemudian di bulan Agustus tahun 2009 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Blitar hanya terdapat pada Kecamatan-kecamatan saja Hal ini mengakibatkan proses pembuatan KTP masyarakat diwakili oleh aparatur Desa dengan datang ke Kecamatan yang memakan waktu lama dan membutuhkan biaya transportasi. Kemudian dari awal Januari Tahun 2011 mulai di terapkan KTP online di Desa-des, yaitu untuk mempercepat proses pembuatan KTP yang tidak perlu waktu yang banyak, dengan proses pembuatan KTP Online yang bersifat Intern, Oleh karenanya masyarakat hanya butuh waktu 10 menit sampai pembuatan KTP selesai.

KTP Online saat ini telah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan¹. peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

¹ Perda nomor 21 tahun 2009

Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.² Hal ini dapat diketahui dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.³ Tetapi dalam penampilan data dibatasi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari pemanfaatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 21 tahun 2009, tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tetapi dalam penampilan data dibatasi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari pemanfaatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 2 tahun 2009, tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tetapi dalam penampilan data dibatasi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari pemanfaatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Tetapi dalam penampilan data dibatasi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari pemanfaatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Serta Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.⁴ Tetapi dalam penampilan data dibatasi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari pemanfaatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas pengimplementasiannya di lapangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang diteliti pada dasarnya pengelolaan KTP adalah suatu satu bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga menjadikan program KTP online sebagai salah satu program yang strategis dan penting kontribusinya untuk keberhasilan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Tujuan dari KTP online ini adalah untuk mempermudah dalam proses pembuatan KTP baru maupun pembuatan KTP hilang dan perpanjangan KTP. Hal ini juga mempermudah dalam pencarian data dan informasi mengenai penduduk atau seseorang, karena dalam KTP online ini data yang dibuat akan langsung terkoneksi dalam data based.

KTP merupakan salah satu bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap penduduk diatas 17 tahun, atau telah pernah menikah wajib memiliki KTP, masa berlaku KTP bagi yang berusia 17 tahun sampai dengan usia dibawah 60 tahun adalah 5 tahun. Bagi penduduk yang berusia diatas 60 tahun masa berlaku KTP adalah seumur hidup, KTP diterbitkan

² Petunjuk pelaksanaan Perda

³ Undang – Undang otonomi daerah, Kabupaten Kediri

⁴ Perda Kabupaten Madiun

untuk permohonan baru, terjadi perubahan data, rusak, hilang, dan habis masa berlakunya.⁵

Proses pembuatan KTP Online yang bersifat Intern pada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari RT / RW, Kantor Kelurahan atau Desa sampai dengan Kantor Kecamatan. Tahapan-tahapan tersebut sering memakan waktu yang cukup lama saat proses pendaftaran permohonan pembuatan KTP di Kantor Desa/ Kecamatan di Kabupaten yang diteliti. Ada juga syarat perpanjangan KTP Online yang bersifat Intern di antaranya, Pertama, mengisi formulir registrasi secara lengkap (Perpanjangan tidak akan diproses jika belum lengkap). Kedua, scan foto / menggunakan foto digital dalam format jpeg, maksimal 200 KB. (Untuk tahun lahir ganjil menggunakan latar belakang merah, untuk tahun lahir genap menggunakan latar belakang biru). Ketiga, scan tanda tangan menggunakan latar belakang putih polos dalam bentuk format jpeg, maksimal 200 KB. Keempat, menyiapkan KTP yang sudah habis masa berlakunya untuk diambil oleh petugas pengantar KTP. Kelima, menyiapkan foto copy KK untuk diambil oleh petugas pengantar KTP. Keenam, mengisi nomor telepon / HP yang bisa dihubungi untuk konfirmasi lebih lanjut. Ketujuh, sebelum melakukan pendaftaran masyarakat harus sudah memiliki Kartu Keluarga (KK). Sebelum KTP Online ada sering terlihat antrian panjang yang banyak di temukan jika pembuatan KTP dilaksanakan di Kecamatan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, serta dapat mengakibatkan terjadinya pungutan liar dengan alasan untuk mempercepat proses pembuatan KTP, hal tersebut tentunya merugikan masyarakat banyak.

Pelayanan yang cepat diperlukan oleh masyarakat yaitu setiap individu di berbagai negara dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (media) apapun. Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi digital menjadi suatu tuntutan, penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat. KTP Online yang dilakukan secara terpadu, tertib dan berlanjut serta dikelola secara profesional dengan memanfaatkan dan memadukan unsur-unsur fungsional, saran dan prasarana baik secara *intern* maupun *ekstern*. Serta tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya, akan tetapi juga komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada pemerintah.

⁵ Undang – Undang No 66 Tahun 2009 tentang syarat sah menjadi warga Negara Republik Indonenisia

KTP Online yang di harapkan melayani masyarakat sesuai yang diharapkan secara cepat, tepat, akurat, relevan, mutakhir. Serta dapat dipercaya dan terpilih sesuai dengan kebutuhan pimpinan, pengelola dan pengguna di setiap tingkatan wilayah. Harapan ini untuk membawa Kabupaten yang di teliti ke arah yang lebih baik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun pelayanan KTP Online ini masih mempunyai kendala yaitu masih ada daerah yang menemui kendala jaringan sehingga perangkat tidak bisa dioperasikan dan pelayanan pembuatan KTP Online gratis tidak maksimal. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang diteliti hanya menyediakan operator dan perangkat, kalau jaringan adalah urusan pihak Hubungan Antar Lembaga (Hubtarga) Setda Kabupaten yang diteliti yang sudah bekerja sama dan memberdayakan fasilitas yang ada yaitu Telkom dan Telkomsel.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penulisan dengan judul : “ANALISIS KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BERKEMBANG DI JAWA TIMUR (KAB. KEDIRI KAB. BLITAR, KAB. NGANJUK, KAB. MADIUN)”.

Kenapa penulis fokus pada empat wilayah tersebut karena di daerah Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Madiun masih lumayan banyak warga yang usia 17 tahun keatas sampai 60 tahun yang tanpa memiliki KTP ataupun e – KTP, padahal kita tahu bahwa program tersbut adalah serentak, adapun beragam alasan mereka, dan berikut adalah table warga yang belum mempunyai ataupun sudah pernah mengurus e – KTP namun belum jadi dari tahun 2014 – 2017 :

NAMA WILAYAH	BELUM PUNYA	JUMLAH PENDUDUK	SUDAH PUNYA E-KTP
KAB. KEDIRI	52.000	1.561.320	1.509.000
KAB. BLITAR	88.632	1.164.105	1.075.000
KAB. NGANJUK	109.000	1.046.330	937.330
KAB. MADIUN	27.629	681.394	653.765
TOTAL	277.261		4.175.095 ⁶

⁶ Database DISPENDUK CAPIL Provinsi Jawa Timur, tahun 2017 (15 November 2018)

Sangatlah prihatin dengan jumlah sekian dimana yang seharusnya selama dua tahun proses pengurusan e – KTP online sudah berjalan, namun masih banyak yang belum mengurus dan sudah mengurus namun belum jadi. Banyak sekali alasan karena blanko e – KTP habis, ataupun dari masyarakat yang mengeluh bahwa ribet dalam mengurus, ini sangat berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meringankan biaya dan memangkas waktu dalam proses pengurusan e – KTP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana solusi agar pembuatan E-KTP online dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan awal penggunaan ICT dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Madiun, dan Nganjuk ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dari penulisan ini yaitu untuk analisis kebijakan kartu tanda penduduk (KTP) Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yang diteliti. Sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui perumusan masalah dalam analisis kebijakan KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.3.2. Untuk mengetahui peramalan kebijakan kolektif dalam analisis kebijakan KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.3.3. Untuk mengetahui rekomendasi kebijakan di instansi terkait analisis kebijakan KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.3.4. Untuk mengetahui pemantauan kebijakan dalam analisis kebijakan KTP online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3.5. Untuk mengetahui penilaian kebijakan dalam analisis kebijakan KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Bagi penulis, kegunaan penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang pelaksanaan proses penulisan mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan juga sebagai ajang Analisis ilmu-ilmu ataupun teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan. Banyak hal baru yang ditemukan dalam proses pelaksanaan penulisan sehingga menambah pengetahuan dan dapat secara langsung menerapkan dari berbagai teori yang dipelajari sangat idealis.

1.4.2. Secara teoritis, penulisan yang dilaksanakan dapat berguna untuk ilmu pemerintahan sesuai program studi yang dipelajari di Universitas Airlangga khususnya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Penulisan ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu bagi Pemerintahan serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penulisan serupa di masa yang akan datang, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala baik hambatan, tantangan, dan gangguan dalam proses pelaksanaan penulisan.

1.4.3. Secara praktis, penulisan yang dilakukan dengan cara pencarian data langsung ke sumber data yang bersangkutan, dapat memberikan informasi mengenai keluhan dan tanggapan masyarakat tentang pelayanan Dispenduk Capil. Dan menjadi evaluasi bagi instansi yaitu Pemerintah Kabupaten Yang diteliti itu sendiri.

Penulisan yang dilakukan ini, diharapkan para aparatur Pemerintah Kabupaten yang diteliti khususnya aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang diteliti dapat mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan analisis kebijakan KTP Online serta dapat memberikan Penulisan yang dapat memberikan masukan-masukan yang diharapkan akan memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Suatu negara memerlukan adanya kebijakan untuk mengatur pemerintahan. Kebijakan yang dibuat pemerintah ditujukan untuk mengarahkan tindakan- tindakan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.⁷

Menurut Joko Widodo definisi analisis di dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis (Widodo, 2009:13).⁸

Berdasarkan pengertian tersebut maka analisis merupakan suatu pemahaman dari suatu hal yang diperoleh melalui penyelidikan sehingga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Pemerintah yang selalu mempunyai kebijakan dalam menjalankan kepentingan untuk kemajuan bersama. Hal ini sejalan dengan pendapat Edi Suharto dalam bukunya Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik bahwa: “Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula government yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik” (Suharto, 2008:03).⁹

Berdasarkan pengertian konsep analisis kebijakan tersebut memberikan keterangan bahwa kebijakan yang ada dengan dasar yang kuat, dalam proses implementasinya haruslah memiliki arah tujuan yang benar-benar jelas, hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada.

Proses analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik adalah : “suatu aktivitas intelektual yang praktis yang di tujukan untuk menciptakan secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan” (Dunn, 1998:44).¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas maka analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan dan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program publik. Analisis tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengabilan keputusan oleh pemerintah.

⁷ Easton, 1969, Government for civilians

⁸ Widodo, 2019 hlm 13

⁹ Soeharto, 2008 hlm 3

¹⁰ Dexter Robert Dunn, 1998 hlm 44

Karakter dari kebijakan publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi adalah : “Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yaitu dengan langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program atau melalui formasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut”(Nugroho, 2004:158)¹¹.

Berdasarkan pengertian karakter analisis kebijakan tersebut memberikan keterangan bahwa analisis kebijakan yang ada dengan dasar yang kuat, dalam proses analisisnya haruslah memiliki arah tujuan yang benar-benar jelas, hal tersebut tidak lain untuk kebijakan publik terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi sebagai Sifat dari masalah-masalah itu sendiri berpengaruh terhadap analisis program-program yang didesain untuk memecahkan masalah tersebut dengan berbagai cara, diantaranya yang dikemukakan oleh William N. Dunn (1998:25) dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik yang mengajukan Lima faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu analisis kebijakan tersebut adalah :

1. Perumusan Masalah Kebijakan, yaitu dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan Masalah Kebijakan terdiri dari beberapa indikator yaitu :

- a. Analisis Batas, yaitu memperkirakan apakah sistem formulasi masalah individual yang kita sebut metaproblem relatif lengkap.
- b. Analisis Klasifikasi, yaitu teknik untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan kondisi permasalahan.
- c. Analisis Hirarki, yaitu teknik untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin dari suatu masalah.
- d. Synectics, yaitu suatu metode yang diciptakan untuk mengenali masalah- masalah yang bersifat analog.
- e. Brainstorming, yaitu metode untuk menghasilkan ide-ide dan tujuan yang membantu untuk mengidentifikasi masalah.
- f. Analisis perspektif berganda, yaitu metode untuk memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai masalah-masalah dan peluang pemecahan secara sistematis.

¹¹ Nugroho, 2004 hlm 158

g. Analisis asumsi, yaitu teknik yang bertujuan mensintesis secara kreatif asumsi-asumsi yang bertentangan dengan masalah kebijakan.

h. Pemetaan argumentasi, yaitu teknik yang menggabungkan pendapat-pendapat dengan informasi kebijakan yang sama, akan menghasilkan pengetahuan yang bertentangan.

Berdasarkan perumusan masalah kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan menambah pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah kebijakan.

2. Peramalan Kebijakan, yaitu menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif. Peramalan Kebijakan terdiri dari beberapa indikator yaitu :

a. Proyeksi, yaitu ramalan yang didasarkan kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan dan dapat diperkuat dengan pendapat-pendapat para otoritas.

b. Prediksi, ramalan yang berdasarkan pada asumsi teoretik yang tegas.

c. Perkiraan, ramalan yang didasarkan pada penilaian informasi atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan.

Berdasarkan Peramalan Kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif.

3. Rekomendasi Kebijakan, yaitu membuahkan pengetahuan yang relevan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diterapkan melalui peramalan. Rekomendasi Kebijakan terdiri dari beberapa indikator yaitu :

a. Pengambilan Keputusan Tunggal, yaitu pilihan yang harus dibuat oleh satu orang saja, yang dapat mempengaruhi orang banyak.

b. Kepastian, yaitu hasil pilihan yang harus diketahui dengan pasti.

c. Kecepatan, yaitu hasil tindakan harus segera terjadi.

Berdasarkan Rekomendasi Kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan membuahakan pengetahuan yang relevan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diterapkan melalui peramalan.

4. Pemantauan Kebijakan, yaitu menyediakan pengetahuan yang diambil dari kebijakan sebelumnya. Pemantauan Kebijakan terdiri dari beberapa indikator yaitu :

- a. Kepatuhan, yaitu untuk menentukan apakah tindakan para aparatur sesuai standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator.
- b. Pemeriksaan, yaitu membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran.
- c. Akuntansi, monitoring menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi.
- d. Ekplanasi, yaitu pemantauan juga menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda.

Berdasarkan Pemantauan Kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan menyediakan pengetahuan yang diambil dari kebijakan sebelumnya.

5. Penilaian Kebijakan, yaitu membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar yang dihasilkan.¹²

- a. Evaluasi Semu, yaitu menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan.
- b. Evaluasi Formal, yaitu menghasilkan informasi valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar program kebijakan.

Berdasarkan Lima faktor analisis kebijakan di atas maka, analisis kebijakan terdiri dari beberapa tahapan dan metode yang dilaksanakan.

¹² (Dunn, 1998:25).

Bermanfaat bagi analisis sebagai pedoman utama dalam menghasilkan atau mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

E-Government merupakan suatu kemajuan pemerintah dalam program-program yang utama saat ini. Menurut Oliver Wendell Holmes dalam bukunya *Sains & Teknologi Jilid 2* menjelaskan pengertiannya yaitu :“Kegunaan Teknologi Informasi untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya”(Holmes, 2000:2).¹³

Definisi tersebut mengatakan bahwa E-Government adalah pelayanan yang sudah mengalami pemrosesan dimana yang sebelumnya belum dapat dimanfaatkan secara langsung mengalami proses pengolahan dapat mengefisienkan biaya, hal tersebut dapat dimanfaatkan dan menjadi informasi yang berguna.

Melengkapi teori tersebut yang diuraikan mengenai pengertian sistem, data dan informasi, melengkapi pandangan tersebut, maka diuraikan mengenai sistem, data dan informasi, M. Khoirul Anwar dalam buku *SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah* menjelaskan pengertian sistem, sistem adalah “seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama¹⁴ untuk mencapai beberapa tujuan”(Anwar, 2004:4). Dimana satu dengan yang lain saling mendukung untuk terlaksananya sistem tersebut sehingga menjelaskan bahwa sistem yang ada tidak dapat berdiri sendiri dimana dalam sistem harus ada keterkaitan yang menjadi pengikat sistem itu sendiri.

Pendapat yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa sistem merupakan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa sistem itu merupakan suatu kesatuan rangkaian kerja yang dapat menghasilkan sesuatu dari hasil rangkaian-rangkaian tersebut. Sesuatu yang dihasilkan oleh rangkaian-rangkaian tersebut tidak lain adalah data.

Merencanakan dan menganalisa perancangan suatu sistem terlebih dahulu harus mengetahui lebih dahulu mengenai komponen-komponen yang ada dalam 10 sistem tersebut baik itu tentang data dan informasi. Keterkaitan data dan informasi sangatlah erat sebagaimana hubungannya antara sebab dan akibat. Dikatakan bahwa data merupakan bentuk dasar dari sebuah informasi, sedangkan

¹³ Oliver W. Holmes 2002 hlm 2

¹⁴ M Khoirul Anwar 2004 hlm 155

informasi merupakan elemen yang dihasilkan dari suatu bentuk pengolahan data. Menurut pendapat Gordon B Davis mengatakan bahwa informasi sebagai “data

yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun yang akan datang”(Davis, 2002:28).¹⁵

Definisi tersebut mengatakan bahwa informasi yang ada adalah data yang sudah mengalami pemrosesan dimana yang sebelumnya belum dapat dimanfaatkan secara langsung akan tetapi setelah mengalami proses pengolahan, data tersebut dapat dimanfaatkan dan menjadi informasi yang berguna.

Hal ini akan memudahkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Ladjamudin dalam bukunya: Analisis dan desain Sistem Informasi, bahwa: sistem informasi merupakan “sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat pelaksanaan akan memberi informasi bagi pengambil keputusan dan/ atau untuk mengendalikan organisasi”(Ladjamudin, 2002:13). Dengan demikian suatu organisasi mendukung kegiatan yang ada dengan perencanaan dan ketepatan waktu sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Suatu informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, dan suatu informasi menggambarkan kejadian-kejadian nyata yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Pengolahan data secara elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dengan menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan dan pengawasan hasil pengolahan tersebut. McLeod suatu informasi berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama, maka dianggap belum valid dan sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
- c. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka

¹⁵ Davis, 2002 hlm 28

informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.

d. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan”¹⁶

(Mc Leod, 2001:61).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulisan menyusun definisi operasional sebagai berikut :

1. Analisis kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas intelektual yang praktis yang di tuju untuk menciptakan secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan.
2. KTP Online adalah sistem yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan berupa data kependudukan di tiap Kecamatan dan Desa yang berdasarkan ICT.
3. Analisis kebijakan pembuatan KTP Online adalah suatu aktivitas intelektual dalam proses kebijakan diterapkan pada prakteknya bukan sekedar teori yang dilakukan melalui sistem yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan berupa data kependudukan secara Online.

Adapun metode-metode dalam Analisis kebijakan KTP Online di lima Kabupaten/Kota yang diteliti yaitu :

1. Perumusan Masalah Kebijakan adalah teknik yang dapat menambah pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan pelaksanaan KTP Online melalui penyusunan agenda. Perumusan Kebijakan ini terdiri dari metode-metode yaitu :
 - a. Analisis Batas adalah suatu teknik untuk memperkirakan apakah sistem formulasi dalam pelaksanaan KTP Online terdapat masalah individual yang kita sebut metaproblem relatif lengkap.
 - b. Analisis Klasifikasi adalah suatu teknik untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yang diteliti untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan kondisi permasalahan.

¹⁶ MC Leod, 2001 hlm 61

c. Analisis Hirarki adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin ada dari suatu masalah pada KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang diteliti.

d. Synectics adalah suatu teknik yang diciptakan untuk mengenali masalah-masalah yang bersifat analog yang terdapat dalam KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang diteliti.

e. Brainstorming adalah suatu teknik untuk menghasilkan ide-ide dan tujuan yang membantu pelaksanaan KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang diteliti untuk mengidentifikasi masalah.

f. Analisis perspektif berganda adalah suatu metode dimana untuk memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang diteliti terhadap masalah-masalah dan peluang pemecahan secara sistematis.

g. Analisis asumsi adalah suatu teknik yang bertujuan mensintesis KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang diteliti secara kreatif asumsi- asumsi yang bertentangan dengan masalah kebijakan.

h. Pemetaan argumentasi adalah suatu teknik yang menggabungkan pendapat-pendapat dengan informasi kebijakan yang sama terhadap KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Nganjuk, Blitar, dan Madiun, akan menghasilkan pengetahuan yang bertentangan.¹⁷

2. Peramalan Kebijakan adalah suatu teknik yang menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang pelaksanaan KTP Online serta masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari di ambalnya alternatif. Ramalan mempunyai tiga bentuk utama yaitu :

a. Proyeksi adalah suatu teknik ramalan yang didasarkan atas kecenderungan masa lalu tentang pembuatan KTP, masa kini ke masa depan yang telah menggunakan KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk dan Madiun dan dapat diperkuat dengan pendapat-pendapat para otoritas.

¹⁷ Kebijakan dan analisis berbagai macam kebijakan yang teori katakana dalam dunia politik, Widodo, 2008 hlm 43 - 50

b. Prediksi adalah suatu teknik ramalan yang berdasarkan pada asumsi teoretik yang tegas terhadap pelaksanaan KTP Online oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk dan Madiun.

c. Perkiraan adalah suatu teknik yang didasarkan pada penilaian informasi atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan yang telah menggunakan KTP Online di Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.

3. Rekomendasi Kebijakan adalah suatu teknik untuk menambah pengetahuan yang relevan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari pelaksanaan KTP Online dan berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diterapkan melalui peramalan. Rekomendasi ada beberapa model pilihan yaitu :

a. Pengambilan Keputusan Tunggal adalah suatu teknik pilihan yang harus dibuat oleh satu orang saja, dan dapat mempengaruhi orang banyak terhadap berjalannya KTP Online di Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.

b. Kepastian adalah suatu teknik hasil KTP Online di Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, Madiun menjadi pilihan yang harus diketahui dengan pasti.

c. Kecepatan adalah suatu sikap dalam bertindak untuk mengetahui hasil KTP Online di Kabupaten Yang diteliti tindakan harus segera terjadi.

4. Pemantauan Kebijakan adalah suatu kegiatan penyediaan pengetahuan yang diambil dari kebijakan pelaksanaan KTP Online sebelumnya. Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu :

a. Kepatuhan adalah suatu sikap dimana akan untuk menentukan apakah tindakan para aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun sesuai standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator.

b. Pemeriksaan adalah suatu kegiatan dimana akan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan KTP Online di Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran.

c. Akuntansi adalah suatu kegiatan monitoring dimana akan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan

sosial dan ekonomi setelah diterapkannya KTP Online di Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.

d. Ekplanasi adalah suatu kegiatan pemantauan untuk mengumpulkan informasi tentang KTP Online di Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun serta dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda.

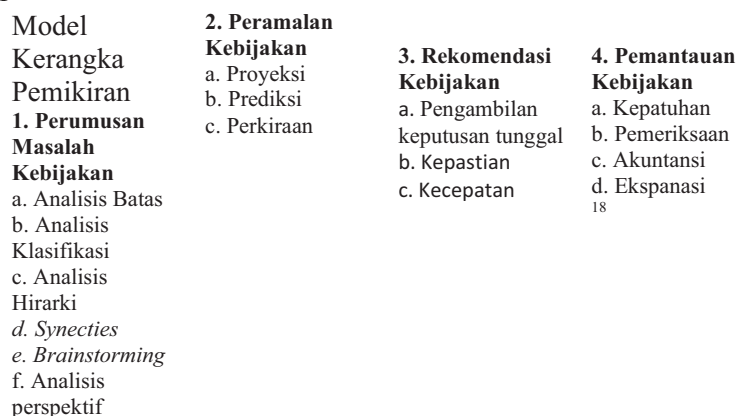
5. Penilaian Kebijakan adalah suatu teknik dimana akan membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan pelaksanaan KTP Online tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar yang dihasilkan. Ada dua pendekatan dalam Penilaian Kebijakan.

a. Evaluasi Semu adalah suatu hasil penilaian kebijakan dimana akan menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan penerapan KTP Online.

b. Evaluasi Formal adalah suatu teknik dimana akan menghasilkan informasi valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan KTP Online di Kabupaten yang diteliti tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar program kebijakan.

Berdasarkan pada teori, konsep, definisi operasional dan indikator-indikator di atas, penulis membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Gambar 1.1



18

¹⁸ Denah kerangka pemikiran

1.6 Metode Penulisan

Adapun dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penulisan dan pengamatan, dengan begitu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan deskriptif.

Metode penulisan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih (Soehartono, 2002:35).¹⁹

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut Sofian Effendi metode penulisan kualitatif adalah:

“Metode penulisan kualitatif adalah metode penulisan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana penulis adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penulisan kualitatif lebih menekankan makna (Effendi, 2005:9).²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu. Hal ini berhubungan antar dua gejala atau lebih yang terdapat pada objek yang diteliti.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini ada tiga yaitu :

1. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan- kegiatan yang mereka lakukan, sehingga penulis dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan. Penulis dalam melakukan penulisan mengenai analisis kebijakan KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.

2. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi melalui komunikasi percakapan yang dilakukan saling berhadapan ataupun bisa melalui telepon.

¹⁹ Soehartono, 2002 hlm 35

²⁰ Effendi, 2005 hlm 9

Penulis mewawancarai aparatur yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, kabupaten Madiun, dan Kota Kediri dengan cara melakukan tanya jawab kepada aparatur, yang mengetahui dan untuk memahami lebih jauh analisis kebijakan KTP online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.

3. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mencari buku-buku mengenai pegangan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan E-Government melalui KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.

4. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen kebijakan-kebijakan yang terkait dengan KTP Online. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai analisis kebijakan KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.

1.6.2 Teknis Analisa Data

Teknik analisa data penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penulisan kualitatif menurut Rahardjo Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penulisan Kualitatif: Berbagai Alternatif Pendekatan dapat diartikan sebagai berikut: “mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”(Nasution, 2003:5). ²¹Teknik analisa data yang sesuai dengan penulisan ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

Secara operasional teknik analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknis analisis data yang dikemukakan buku yang berjudul Analisis Data Kualitatif: sumber tentang metode-metode baru.

1. Data *reduction* (reduksi data) sebagai proses pemilihan, penyerderhanaan klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data dilapangan, reduksi data sesudah dilakukan semenjak pengumpulan data.

2. Data *Display* (penyajian data) merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk

²¹ Nasution, 2003 hlm 5

teks yang pada mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang di antara lain terkait dengan pelaksanaan program Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan) yaitu berdasarkan reduksi interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (*specific*) sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (*general*)²²

(Miles dan Huberman 1992:15-20).

Pengertian analisis data tersebut menurut Miles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul Analisis Data Kualitatif: adalah satu data yang harus dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Data yang di analisis oleh penulis adalah data kualitatif.

1.6.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penulisan ini adalah purposive (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik dalam penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan. Menurut Masri Singarimbun, teknik pengambilan sampel purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penulisan. Sampel ditetapkan secara sengaja oleh penulis (Singarimbun, 1995:26).²³

Penentuan informan dalam penulisan ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penulisan. Informan dalam penulisan ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan Analisis Kebijakan KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun., yang terdiri dari :

1. Dua orang Staf Bagian informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah orang yang mengetahui tentang analisis kebijakan E-Government melalui KTP Online

²² Miles dan Huberman, 1992 hlm 15 - 20

²³ Singarimbun, 1995 hlm 26

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.

2. Satu orang Staf Bidang Informasi dan Analisis Hubungan Antar Lembaga (HUBTARGA) Setda Provinsi Jawa Timur sebagai orang yang mengetahui tentang analisis kebijakan, pelaksana dalam KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.

3. Tiga orang Staf Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun yang mengetahui tentang analisis kebijakan KTP Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.

4. Dua orang Masyarakat yang terdiri dari pelaksana program baik pemerintah maupun pihak pelaksanan yang ditunjuk di Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.

5. Satu Staf Bagian Informasi di Diskominfo Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun sebagai pakar ICT yang ikut merumuskan kebijakan penerapan KTP Online di Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Madiun.